



LAPORAN SINGKAT

KOMISI VIII DPR RI

BERMITRA DENGAN KEMENTERIAN AGAMA, KEMENTERIAN SOSIAL, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI), BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS), DAN BADAN WAKAF INDONESIA (BWI).

Rapat Ke	: 17
Tahun Sidang	: 2016-2017
Masa Persidangan	: V
Jenis Rapat/ke-	: Rapat Dengar Pendapat/ ke - 4
Dengan	: -
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Senin, 17 Juli 2017
Waktu	: Pukul 10.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270
Ketua Rapat	: H. Iskan Qolba Lubis, MA.
Sekretaris Rapat	: Yanto Supriyanto, S.H
Acara	: Pendalaman Program dan Fungsi RKA K-L dan RKP K-L Tahun 2008
Hadir	: 1. orang dari 49 orang Anggota Komisi VIII DPR RI. 2. Bimas Kristen Kemenag RI beserta jajarannya 3. Bimas Katholik Kemenag RI beserta jajarannya 4. Bimas Hindu Kemenag RI beserta jajarannya 5. Bimas Buddha Kemenag RI beserta jajarannya

I. PENDAHULUAN:

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 14.15 WIB dan dinyatakan terbuka.

2. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, H. Iskan Qolba Lubis, MA sesuai tempat dan acara tersebut di atas.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Direktur Jenderal Bimas Kristen, Direktur Jenderal Bimas Katolik, Direktur Jenderal Bimas Hindu, dan Direktur Jenderal Bimas Buddha Kementerian Agama RI membahas **“Pendalaman Program dan Fungsi RKA-KL Tahun 2018”**, disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI dapat menerima penjelasan pagu indikatif Direktorat Jenderal Bimas Kristen, Direktorat Jenderal Bimas Katolik, Direktorat Jenderal Bimas Hindu, dan Direktorat Jenderal Bimas Buddha Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2018, yaitu:
 - a. Ditjen Bimas Kristen mendapat alokasi anggaran sebesar Rp1.893.729.019.000 (*satu triliun delapan ratus sembilan puluh tiga miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta sembilan belas ribu rupiah*).
 - b. Ditjen Bimas Katolik mendapat alokasi anggaran sebesar Rp910.041.890.000 (*sembilan ratus sepuluh miliar empat puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah*).
 - c. Ditjen Bimas Hindu mendapat alokasi anggaran sebesar Rp772.638.166.000 (*tujuh ratus tujuh puluh dua miliar enam ratus tiga puluh delapan juta seratus enam puluh enam ribu rupiah*).
 - d. Ditjen Bimas Buddha mendapat alokasi anggaran sebesar Rp279.466.091.000 (*dua ratus tujuh puluh sembilan miliar empat ratus enam puluh enam juta sembilan puluh satu ribu rupiah*).
2. Komisi VIII DPR RI dapat memahami usulan tambahan anggaran Direktorat Jenderal Bimas Kristen, Direktorat Jenderal Bimas Katolik, Direktorat Jenderal Bimas Hindu, dan Direktorat Jenderal Bimas Buddha Kementerian Agama RI tahun 2018, yaitu:
 - a. Ditjen Bimas Kristen mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp85.000.000.000 (*delapan puluh lima miliar rupiah*) yang akan digunakan untuk kegiatan Pesparawi nasional dan kegiatan pembinaan penyuluh Agama Kristen.

- b. Ditjen Bimas Katolik mengusulkan tambahan anggaran prioritas sebesar Rp104.000.000.000,- (*seratus empat miliar rupiah*) yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan anggaran fungsi agama dan fungsi pendidikan.
 - c. Ditjen Bimas Hindu mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp36.512.206.000 (*tiga puluh enam miliar lima ratus dua belas juta dua ratus enam ribu rupiah*), yang akan digunakan untuk dukungan manajemen, penambahan sasaran pembinaan dan operasional tenaga penyuluh, peningkatan kompetensi penyuluh serta pengoptimalan pelayanan penyuluh kepada umat, penambahan sasaran dialog kerukunan, penambahan sasaran bimbingan keluarga, serta pembentukan kelompok binaan penyuluh.
 - d. Ditjen Bimas Buddha mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp29.401.256.215 (*dua puluh sembilan miliar empat ratus satu juta dua ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima belas rupiah*) yang akan digunakan untuk pengadaan kitab suci agama Buddha dan bantuan rehabilitasi/pembangunan rumah ibadah.
3. Dalam rangka melakukan penyempurnaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2018, Komisi VIII DPR RI mendesak Direktur Jenderal Bimas Kristen, Direktur Jenderal Bimas Katolik, Direktur Jenderal Bimas Hindu, dan Direktur Jenderal Bimas Buddha Kementerian Agama RI untuk menindaklanjuti dengan sungguh-sungguh pandangan Anggota Komisi VIII DPR RI:
- a. Menyampaikan data pendukung dari program dan anggaran prioritas masing-masing satuan kerja secara lebih lengkap ke Komisi VIII DPR RI sebagai bahan pengawasan.
 - b. Pendistribusian program pembinaan dan bantuan terhadap lembaga pendidikan keagamaan dan rumah ibadah memprioritaskan pemenuhan aspirasi daerah.
 - c. Target capaian program harus realistis berdasarkan data yang valid dan terukur secara kualitatif dan kuantitatif.
 - d. Menyampaikan data jumlah rumah ibadah yang akan dan telah diberikan bantuan, pengadaan kitab suci yang telah dan akan dicetak, sarana dan prasarana pendidikan keagamaan yang memperoleh bantuan, serta jumlah penyuluh agama ke Komisi VIII DPR RI.

- e. Memprioritaskan pemenuhan anggaran tunjangan terhadap guru di lingkungan satuan kerja yang memiliki fungsi pendidikan.
- f. Pendistribusian program pengadaan kitab suci harus dilakukan secara adil sehingga dapat memenuhi kebutuhan umat.
- g. Menyesuaikan nama program/kegiatan dengan anggaran dan target, untuk program bimbingan keluarga Kristen.

III. P E N U T U P

Rapat ditutup pukul 14.47 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI
WAKIL KETUA,**

H. ISKAN QOLBA LUBIS, MA.